

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Keterandalan Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, menyatakan bahwa terdapat empat karakteristik dalam menentukan suatu nilai dari informasi laporan keuangan yang berkualitas yaitu :

1. Relevan

Jika informasi dalam laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap keputusan pengguna (*user*), maka laporan keuangan tersebut dapat dikatakan relevan. Suatu Informasi yang bernilai relevan meliputi ketepatanwaktuan, lengkap, bermanfaat prediktif dan bermanfaat umpan balik.

2. Andal

Suatu laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila disajikan berdasarkan fakta yang jujur, terbebas dari kesalahan material dan hal-hal yang menyesatkan. Terdapat tiga karakteristik dalam mencapai informasi yang andal seperti, dapat diverifikasi, bersifat netral serta disajikan secara jujur.

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan yang bermanfaat adalah laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Dapat dipahami

Jika pengguna memahami informasi sesuai dengan batas kemampuan dan pemahamannya yang terdapat pada laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut bernilai informasi yang dapat dipahami.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

## **B. Kualitas Sumber Daya Manusia**

1. Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Winidyaningrum dalam Suparman (2014: 3) menyatakan bahwa kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu memahami logika akuntansi dengan baik, maka kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan tidak akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan laporan tersebut akan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Suparman, 2014: 3).

Menurut Hullah (2012: 11) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

## 2. Komponen Kualitas Sumber Daya Manusia

Ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi sumber daya manusia yaitu:

- a. Pengetahuan (*knowledge*), informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu), misalnya bahasa komputer.
- b. Kemampuan (*skill*), sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada

karyawan. Misalnya standar perilaku para karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.

- c. Perilaku individu (*attitude*), perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji. Konsep dasar kompetensi berawal dari konsep individu yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan mengembangkan kemampuan individu agar dapat bekerja dengan prestasi yang luar biasa. Individu merupakan komponen utama yang menjadi pelaku dalam organisasi. Oleh karena itu, kemampuan organisasi tergantung dari kemampuan individu-individu yang bekerja dalam organisasi (Hutapea dan Thoha, 2008: 28).

Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Sumber daya manusia mencakup : pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan.

- a. Pendidikan

Menurut Hullah (2012: 11) mengatakan bahwa pendidikan akuntansi selama ini memfokuskan pada dimensi pilihan kebijakan tetapi tidak memperhatikan nilai dan kredibilitas yang mempengaruhi pilihan tersebut. Pada dasarnya akuntan memiliki tindakan berdasarkan nilai yang ada dalam pikiran mereka. Menurut Hullah (2012: 11), manfaat dan dampak dari penyelenggaraan pendidikan adalah:

- 1) Peningkatan Keahlian Kerja

- 2) Pengurangan Keterlambatan Kerja, Kemangkiran, serta perpindahan Tenaga Kerja
- 3) Pengurangan Timbulnya Kecelakaan dalam Bekerja, Kerusakan, dan Peningkatan Pemeliharaan terhadap alat-alat kerja
- 4) Peningkatan Produktivitas Kerja.

b. Pengalaman

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktek. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hullah, 2012: 11).

c. Pelatihan

Pelatihan (*training*) merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja (Simamora, 2010: 273). Menurut Pasal I ayat (9) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,

disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini (*current job oriented*). Sasaran yang ingin dicapai dan suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini.

### **C. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 225 untuk memudahkan pelaksanaan pembukuan bendahara pengeluaran diperkenankan menggunakan software aplikasi, tetapi konsekuensinya pada bendahara pengeluaran harus mampu dan mahir dalam mengoperasikan komputer serta memahami aplikasi prosedur penatausahaan keuangan daerah dan pembukuan bendahara pengeluaran.

Menurut Hullah (2012: 11) teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Menurut Suparman (2014: 3) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Teknologi Informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang, relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Suparman, 2014: 3).

#### **D. Sistem Pengendalian Internal**

##### **1. Pengertian Pengendalian Internal**

Pengendalian internal sangat penting dalam perkembangan operasi perusahaan, karena masalah-masalah yang timbul sangat kompleks. Dengan demikian, diperlukan suatu pengendalian internal yang baik dan memadai. sesuai dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dunia usaha. Pengertian pengendalian intern menurut SAS (*Statement on Auditing Standard*) dalam Anggraeni (2014: 6) mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut:

- a. Pengendalian intern akuntansi. Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

- b. Pengendalian administratif. Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Berdasarkan pengertian pengendalian intern tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa pengendalian intern merupakan pengendalian terhadap administrasi keuangan maupun pelaporan keuangan mulai dari proses transaksi sampai dengan pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh pihak internal manajemen perusahaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Pengendalian Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengendalian lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengendalian intern adalah Aparat Pengendalian Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

Pengendalian intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan auditor yang profesional.

Pengertian pengendalian internal yaitu: “Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau

melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya” (Krismiaji, 2010: 218).

Pendapat lain menyatakan bahwa: Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personal entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan (b) Efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Tunggal, 2010: 195).

Selain itu pendapat lain diungkapkan oleh James Hall (2011: 180) menyatakan bahwa: Pembuatan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal adalah kewajiban pihak manajemen yang penting. Aspek mendasar dari tanggung jawab penyediaan informasi pihak manajemen adalah untuk memberikan jaminan yang wajar bagi pemegang saham bahwa perusahaan dikendalikan dengan baik. Selain itu pihak manajemen bertanggung jawab untuk melengkapi pemegang saham serta investor dengan informasi keuangan yang andal dan tepat waktu.

Berdasarkan dari berbagai definisi pengendalian internal maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen dan melingkupi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadopsi definisi pengendalian intern dari COSO, seperti dinyatakan dalam Pernyataan Standar Auditing No. 69 (IAI, 2009: 319.2), yaitu: Pengendalian intern adalah suatu proses

yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain entitas, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa COSO pun menekankan Pengendalian Intern sebagai suatu proses, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari entitas. Untuk tujuan pelaporan manajemen, Pengendalian Internal terkait penjagaan asset dari pengambilan, penggunaan, atau penghilangan yang tidak terotorisasi adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya dari sebuah entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan/jaminan yang wajar berkaitan dengan pencegahan atau deteksi dini terhadap pengambilan, penggunaan, atau penghilangan yang tidak terotorisasi terhadap asset entitas sehingga dapat memberikan pengaruh/efek yang material terhadap laporan keuangan.

Dengan adanya definisi pengendalian intern yang lebih luas dari COSO itu, maka secara fundamental terdapat titik temu antara pengendalian intern yang selama ini berkembang dalam sektor swasta, dengan pengendalian manajemen yang terutama berkembang dalam sektor publik. Menurut *Government Accounting Organization (GAO)* apabila pengendalian intern itu merupakan bagian integral dari sistem yang digunakan oleh manajemen yang tidak terbatas pada aspek keuangan saja, maka pengendalian intern itu memiliki pengertian yang sama dengan pengendalian manajemen.

## 2. Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

a. Keandalan informasi keuangan

Pengendalian intern ini membuat manajemen bertanggungjawab menyiapkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak intern dan ekstern perusahaan. Laporan yang disajikan harus dapat diandalkan.

b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Pengendalian intern ini dimaksudkan agar organisasi melakukan kegiatannya sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

c. Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian intern dalam perusahaan merupakan alat untuk mengurangi kegiatan pemborosan dan mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien dalam operasi perusahaan (Mulyadi, 2014: 180).

Ketiga tujuan pengendalian internal tersebut dapat dicapai melalui pengendalian internal yang efektif dan unsur-unsur pengendalian internal juga merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian internal yang memadai. Oleh karena itu agar tujuan pengendalian dapat tercapai perusahaan harus mempertimbangkan komponen-komponen pengendalian internal.

Tujuan dari pengendalian intern menurut Bastian (2007: 154) adalah sebagai berikut:

a. Untuk melindungi harta/aktiva organisasi dan pencatatan pembukuannya.

Aktiva organisasi bisa dicuri, dirusak atau disalahgunakan secara sengaja atau tidak sengaja. Demikian juga untuk aktiva tidak nyata seperti dokumen, surat berharga dan catatan keuangan, pengendalian internal dibentuk untuk mencegah atau menemukan aktiva yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat.

b. Mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi

Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji kecermatannya untuk melaksanakan operasi. Pengendalian intern dapat mencegah dan menemukan kesalahan pada saat yang tepat.

c. Meningkatkan efisiensi usaha bank

Pengendalian intern dalam organisasi ditujukan untuk menghindari pekerjaan berganda yang tidak perlu dan mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha, termasuk pencegahan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

d. Mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan

Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian intern memberikan jaminan bahwa prosedur dan peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

3. Komponen Pengendalian Internal

Sukrisno (2012: 100) menyatakan bahwa pengendalian intern terdiri atas lima komponen yang saling terkait, yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut ini:

- 1) Integritas dan nilai etika
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
- 4) Struktur organisasi

- 5) Pemberian wewenang dan tanggungjawab
- 6) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

b. Penaksiran Risiko

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini:

- 1) Perubahan dalam lingkungan operasi
- 2) Personel baru
- 3) Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki
- 4) Teknologi baru
- 5) Lini produk, produk, atau aktivitas baru
- 6) Restrukturisasi korporasi
- 7) Operasi luar negeri
- 8) Standar akuntansi baru

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas, sudah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini:

- 1) *Review* terhadap kinerja
- 2) Pengolahan informasi
- 3) Pengendalian fisik
- 4) Pemisahan tugas

d. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggungjawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami:

- 1) Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan
- 2) Bagaimana transaksi tersebut dimulai
- 3) Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi
- 4) Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk

alat elektronik (seperti komputer dan *electronic data interchange*) yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi.

e. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Di berbagai entitas, auditor intern atau personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan *Customers* dan komentar dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.

4. Keterbatasan Struktur Pengendalian Internal

Keterbatasan yang terdapat dalam pengendalian internal dapat mengakibatkan tujuan dari pengendalian internal tidak akan tercapai. Keterbatasan pengendalian internal, yaitu:

a. Kesalahan dalam pertimbangan

Sering kali, manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

b. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

c. Kolusi

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan dapat terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.

d. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah diterapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.

e. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern (Mulyadi, 2014: 181).

Keterbatasan pengendalian intern adalah kondisi atau keadaan yang menyebabkan tidak berfungsinya pengendalian sebagaimana mestinya. Keterbatasan pengendalian intern sudah tentu ada, sehingga pengawasan terhadap pengendalian tersebut masih diperlukan.

Pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar namun tidak mutlak, bahwa tujuan dari pengendalian-pengendalian tersebut akan tercapai. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan yang melekat pada pengendalian intern, yaitu sebagai berikut:

a. Kesalahan dalam Pertimbangan

Sering kali manajemen dan personel lainnya melakukan pertimbangan yang kurang matang dalam pengambilan keputusan bisnis, atau dalam melakukan tugas-tugas rutin karena kekurangan informasi, keterbatasan waktu, atau penyebab lainnya.

b. Kemacetan

Kemacetan pada pengendalian yang telah berjalan bias terjadi karena petugas salah mengerti dengan instruksi, atau melakukan kesalahan karena kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perpindahan personel sementara atau tetap, atau perubahan sistem atau prosedur bisa juga mengakibatkan kemacetan.

c. Kolusi

Kolusi atau persengkokolan yang dilakukan oleh seorang pegawai lainnya, atau dengan pelanggan atau pemasok tidak terdeteksi oleh struktur pengendalian internal. Misalkan kolusi dilakukan oleh tiga pegawai perusahaan, masing-masing dari bagian personalia, produksi, dan bagian penggajian, untuk melakukan pembayaran gaji kepada karyawan.

d. Pelanggaran oleh manajemen

Manajemen bisa melakukan pelanggaran atas kebijakan atau prosedur-prosedur untuk tujuan-tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi,

atau membuat laporan keuangan menjadi tampak baik, misalnya membuat laba bersih menjadi lebih tinggi agar bonus menjadi tinggi atau harga pasar saham baik, atau tidak mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan utang atau adanya pelanggaran terhadap undang-undang.

e. Biaya dan manfaat

Biaya penyelenggaraan suatu struktur pengendalian internal seyogianya tidak melebihi manfaat yang akan diperoleh dari penerapan pengendalian internal tersebut. Oleh karena itu walaupun pengendalian untuk sesuatu hal diperlukan, namun kadang-kadang tidak diterapkan oleh perusahaan, karena biaya penyelenggaraan atau pengorbanannya tidak sepadan dengan manfaatnya. Oleh karena pengukuran biaya dan manfaat sulit dilakukan dengan tepat, serta melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam mengevaluasi hubungan biaya dan manfaat tersebut (Jusup, 2014: 158).

Setiap pengendalian intern memiliki keterbatasan bawaan, pengendalian intern hanya memberikan keyakinan memadai (tidak mutlak) kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan perusahaan. Pengendalian intern tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, meskipun telah dirancang dan disusun dengan sebaik-baiknya. Bahkan meskipun sistem yang ideal telah dirancang, keberhasilannya tetap tergantung pada kompetensi dan keandalan daripada pelaksanaannya.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu diambil dari hasil penelitian berupa jurnal yang telah dipublikasikan, yang disajikan dalam paparan berikut ini:

**TABEL I**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

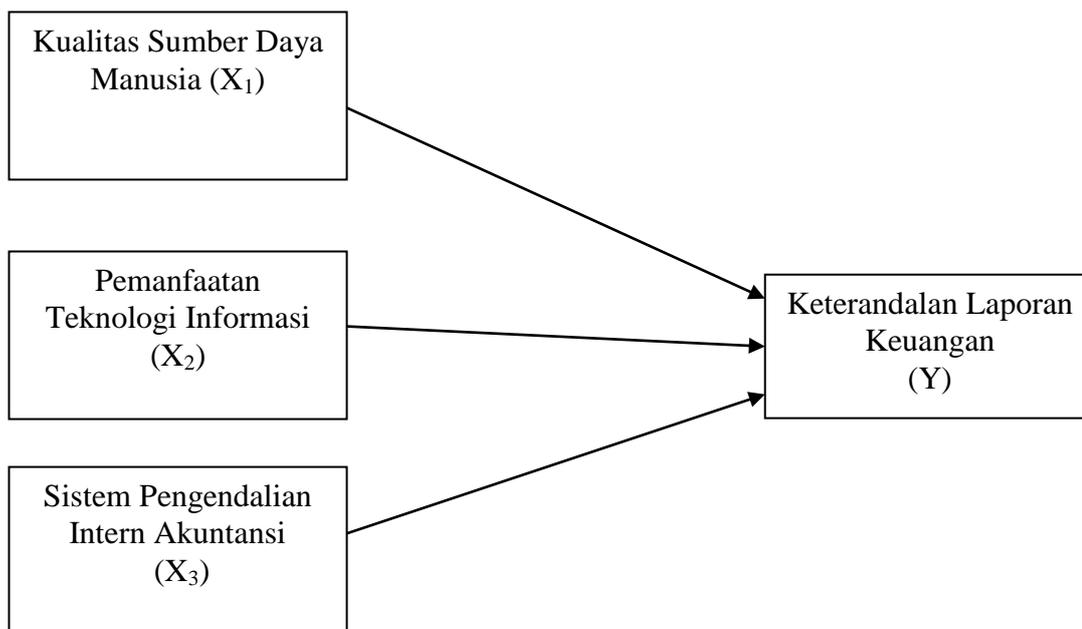
<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Anggraeni (2014)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo)	Variabel Independen: Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, SPI Akuntansi dan Pengawasan Keuangan  Variabel dependen: Keterandalan Laporan Keuangan	- Analisis regresi linier berganda - Uji t - Uji F - Koefisien determinasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas SDM dan pengawasan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Suparman (2014)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng	Variabel Independen: Kualitas SDM dan Pemanfaatan TI  Variabel dependen: Keterandalan Laporan Keuangan	- Analisis regresi linier berganda - Uji t - Uji F - Koefisien determinasi	Kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan TI berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng
3.	Primayana (2014)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng)	Variabel Independen: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah  Variabel dependen: Keterandalan Laporan Keuangan	- Analisis regresi linier berganda - Uji t - Uji F - Koefisien determinasi	Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap berpengaruh signifikan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
4.	Karmila (2014)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau)	Variabel Independen: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern  Variabel dependen: Keterandalan Laporan Keuangan	- Analisis regresi linier berganda - Uji t - Uji F - Koefisien determinasi	Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada Provinsi Riau. Sedangkan variabel kapasitas sumber daya manusia dan pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan SKPD pada Provinsi Riau.
5.	Sapitri (2015)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Buleleng)	Variabel Independen: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi  Variabel dependen: Keterandalan Laporan Keuangan	- Analisis regresi linier berganda - Uji t - Uji F - Koefisien determinasi	Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng.
6.	Azlan (2015)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	Variabel Independen: Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Pengawasan Keuangan Daerah  Variabel dependen: Keterandalan Laporan Keuangan	- Analisis regresi linier berganda - Uji t - Uji F - Koefisien determinasi	Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
7.	Komasari (2017)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan)	Variabel Independen: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi  Variabel dependen: Keterandalan Laporan Keuangan	- Analisis regresi linier berganda - Uji t - Uji F - Koefisien determinasi	Variabel pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sumber: Anggraeni (2014), Suparman (2014), Primayana (2014), Karmila (2014), Sapitri (2015), Azlan (2015) dan Komarasari (2017)

## F. Kerangka Pemikiran

Untuk menunjukkan suatu arah dari penyusunan skripsi agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**GAMBAR 1**

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

Keterangan:

Dari skema kerangka pemikiran di atas, terlihat bahwa terdapat dua variabel, yaitu:

1. Variabel Independen (Bebas)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, yang termasuk variabel bebas adalah Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Akuntansi dan Transparansi.

2. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dalam hal ini adalah minat Keterandalan Laporan Keuangan.

## **G. Hipotesis**

“Hipotesis adalah pernyataan mengenai sesuatu hal yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis tersebut harus diuji dan dibuktikan kebenarannya lewat penelitian dan pengevaluasi data penelitian” (Djarwanto dan Subagyo, 2006: 183). Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Laporan Keuangan**

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kualitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Anggraeni, 2014: 8). Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan. Selain itu, pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan.

Penyusunan Pelaporan keuangan pemerintah daerah harus disusun oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten agar laporan keuangannya relevan dan handal. Sumber daya manusia adalah faktor paling penting yang mempengaruhi kenadalan pelaporan keuangan pemerintah. Sumber daya manusia yang ada pada organisasi publik yaitu pada pemerintahan harus memiliki kualitas untuk melaksanakan sistem akuntansi. Jika sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak berkualitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem informasi yang kualitasnya bisa menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, salah satunya keterandalan dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2014), Suparman (2014), Primayana (2014), Sapitri (2015), dan Azlan (2015) menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta.

## 2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Laporan Keuangan

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Dengan adanya teknologi informasi ini dapat membantu Pegawai-pegawai pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah serta memudahkan dalam memproses, mengolah, dan menyimpan data keuangan secara sistematis. Pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisasi berbagai kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang andal. Penjelasan tersebut didukung oleh hasil penelitian Suparman (2014), Primayana

(2014), Karmila (2014), Sapitri (2015), Azlan (2015) dan Komarasari (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta

### 3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Laporan Keuangan

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Keterandalan laporan keuangan tersebut tercermin dari ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang andal terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Untuk itu, diperlukan adanya sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan hal yang paling penting dalam suatu perusahaan. Tanpa adanya sistem ini, maka akan sering terjadi kecurangan yang akan merugikan perusahaan itu sendiri. Dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan, dan ketidaktepatan. Untuk meminimumkan bahaya ini, profesi akuntansi mengesahkan

seperangkat standar dan prosedur umum yang disebut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Penjelasan tersebut didukung oleh hasil penelitian Sapitri (2015), Primayana (2014), Azlan (2015), Komarasari (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Sistem pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta.